

**PERANAN GMIM (GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA)
DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT DI BIDANG POLITIK**

Oleh : GRACE SOPHIE KARDIA TOREH

ABSTRACT

Keterlibatan para tokoh GMIM dalam kancah perpolitikan di Sulawesi Utara pasca orde baru, semakin besar Setelah orde baru. Di era reformasi membuka peluang bagi institusi-institusi masyarakat untuk mengambil peran besar dalam pergerakan politik baik nasional maupun didaerah. Pergulatan politik di Indonesia yang ditandai dengan pergulatan baik menuju kekuasaan maupun proses legislasi di DPR disertai dengan seringnya perilaku politisi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moralitas menjadi warna kelam dunia politik yang dimasuki oleh jemaat beragama, dalam hal ini jemaat Kristen. Catatan keikutsertaan politisi Kristen dalam perjalanan politik bangsa Indonesia dalam dua dekade terakhir ini justru menggambarkan perekrutan dan pemanipulasian legitimasi kelompok (agama) Kristen untuk mengupayakan kekuasaan dan tidak menjamin kekuasaan tersebut dipakai untuk kesejahteraan masyarakat menjadi wajah buruk keterlibatan agama dalam politik Bahkan politisi Kristen termasuk didalamnya beberapa oknum tokoh pimpinan Kristen yang tidak mencerminkan perilaku yang diharapkan secara Kristiani memunculkan pertanyaan sejauh mana keterlibatan tokoh agama Kristen; Pendeta, Gembala, penatua atau pemegang tugas dan jabatan gerejawi lainnya dalam arena politik praktis. Yang dimaksudkan dengan politik praktis disini adalah keikutsertaan dalam usaha memperoleh kekuasaan politik. Usaha memperoleh kekuasaan politik ini dapat dilakukan untuk dirinya, kelompoknya atau partainya atau sekurang-kurangnya membantu orang lain atau partai yang didukungnya untuk memperoleh kekuasaan sesuai aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada.

Key words : GMIM, partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Semua Agama sedikit banyak telah mengubah dunia dan membawa kemajuan bagi masyarakat. Tetapi juga Agama dapat dipergunakan untuk memperoleh pembenaran atas praktik kehidupan dalam masyarakat dan peneguhan nilai-nilai yang dipegang masyarakat. Maka masyarakat mencari pembenaran pada agama agar dapat diterima. Misalnya, peraturan masyarakat adalah perintah Tuhan. Pemimpin adalah wakil Tuhan, oleh karena itu nilai-nilai pada masyarakat perlu didukung oleh Agama. Secara teoritis hubungan antara Negara dan Agama dapat berbentuk: Negara memusuhi Agama; Negara dan Agama di pisahkan; Negara dan Agama dibedakan tetapi bekerjasama; Negara menyatu dengan Agama.

Negara memusuhi Agama, maksudnya negara dapat memusuhi Agama karena alasan ideologis atau praktis. Alasan ideologis, bila Negara memusuhi agama karena menganut suatu ideologi yang tak menerima Agama. Misalnya, dalam ideologi itu Agama dianggap mengganggu kehidupan masyarakat dan keberadaan serta kegiatan keagamaan di nilai mengganggu kehidupan program negara. Alasan praktisnya, bila negara pada dasarnya dan menurut Undang-Undanganya tidak anti Agama. Tetapi Agama di anggap menjadi penghambat program modernisasi dan pembangunan negara.

Negara dan Agama di pisahkan. Maksudnya hubungan antara Negara dan Agama dikatakan terpisah, bila kedua lembaga itu tidak ada jalinan baik secara formal maupun material dan praktisnya. Dalam negara yang terpisah dari agama, kedudukan, fungsi dan perundang-undangan negara. Dalam praktiknya, negara membiarkan Agama ada dan melakukan kegiatan. Tetapi negara tidak memberi bantuan apa-apa. Yang di perhatikan negara adalah ketertiban umum. Agama boleh melakukan segala kegiatannya baik yang berupa ibadah maupun upacara, asal tidak mengganggu ketertiban umum.

Negara dan Agama dibedakan tetapi dapat bekerjasama. Dalam keadaan seperti ini, negara menjamin kehidupan dan kegiatan semua Agama yang ada dalam negara iu secara sama. Negara bersikap netral dan berpihak kepada salah satu Agama. Negara memberi keleluasan kepada semua Agama untuk berkembang dan mengamalkan ajaran iman masing-masing. Dimana terhadap Negara, Agama bersikap mendukung, loyal dan kerjasama.

Tetapi dengan demikian, tak berarti bahwa Agama hanya ikut dan taat saja atas perintah dan kebijakan Negara. Karena itu Agama berurusan dengan nilai kemanusiaan, etikal, moral dan spiritual dan mempunyai jangkauan ke alam keabadian. Tetapi dengan demikian, tak berarti bahwa Agama hanya ikut dan taat saja atas perintah dan kebijakan Negara. Karena itu Agama berurusan dengan nilai kemanusiaan, etikal, moral dan spiritual dan mempunyai jangkauan ke alam keabadian.

Negara menyatu dengan Agama. Dimana Negara dapat menyatu dengan Agama, bila sistem keagamaan menguasai kehidupan Negara. Bentuknya bisa berupa teokrasi dan monokrasi. Theos bahasa Yunani berarti Allah, Tuhan dan Kratos berarti kekuatan. Teokrasi berarti Negara didasarkan atas Agama dan pemerintahan Negara diatur menurut kehendak dan perintah Tuhan sebagaimana termuat dalam kitab suci dan ajaran Agama. Negara dan pemerintahan teokratis dapat di pimpin oleh raja sebagai penjelmaan Tuhan atau Dewa, atau oleh para pejabat Agama sebagai Wakil Tuhan/Dewa. Nomokrasi berasal dari kata Yunani nomos, yang berarti hukum dan kratos berarti kekuatan. Hukum dalam negara neokratis berarti hukum Agama. Maka nomokratis berarti Negara dijalankan atas hukum negara dan bentuk-bentuknya dapat secara jelas tersurat dalam Undang-Undang dasar Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh menyangkut bagaimana peran gereja GMIM dalam penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang politik khususnya di Jemaat Salafide Tinoor ?

Penelitian adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati.

PEMBAHASAN

A. Peran Gereja dalam Pendidikan Politik untuk Peningkatan Kapasitas

Penelitian ini merupakan analisis mengenai peran Gereja terlebih khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam peningkatan kapasitas masyarakat dibidang politik, sehingga menjadikan warga gereja dewasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil wawancara dengan informan mengenai program pelayanan GMIM tahun pelayanan 2010-2013 yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi warga GMIM, adalah sebagai berikut:

Pdt. Arthur Rumengan selaku wakil sekretaris BPMS GMIM mengatakan: GMIM dalam melaksanakan tugas pelayanan, dituangkan melalui program kerja yang disusun setiap tahunnya, program kerja ini dibagi menurut pelayanan kategorial yang ada, yaitu Bapa, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak. Dalam penetapan program pelayanan ini disampaikan melalui suatu rapat paripurna yaitu Sidang Tahunan Majelis Sinode (STMS) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam STMS ini dilaporkan dan dibahas kegiatan/program pelayanan dari masing-masing kategorial yang ada sepanjang tahun yang berjalan.

Pdt. Arthur Rumengan sekretaris BPMS GMIM mengatakan: dalam periode pelayanan 2010-2013, banyak program yang telah dilaksanakan oleh GMIM yang berhubungan dengan pemberian pendidikan politik bagi warga gereja khususnya warga GMIM, program pendidikan politik ini terbagi atas beberapa BIPRA yang melaksanakan, seperti PKB GMIM, dan Pemuda GMIM. Pemberian pendidikan politik bagi warga gereja ini bertujuan memberikan pembekalan dan pengetahuan, agar warga GMIM tidak lupa akan kapasitasnya sebagai warga Negara, yang harus turut aktif dalam pelaksanaan pemberian suara seperti pada pemilu. Kami tidak mengarahkan, tetapi lebih dititikberatkan kepada pemberian diri/partisipasi politik warga gereja terhadap mekanisme politik yang ada di Negara ini, agar kedepannya warga GMIM sadar akan kapasitasnya sebagai jemaat dan warga Negara, yang tentunya mempunyai hak-hak politik tertentu.

Pnt. Billy Lombok selaku ketua Kategorial Pelayanan Pemuda GMIM mengatakan: dalam program pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemuda GMIM, sebenarnya banyak sekali program yang tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada pemuda GMIM agar mampu memainkan peran sebagai pemuda yang tanggap, aktif dan cerdas, dalam berinovasi, berkreatifitas, dan tumbuh dalam iman kekristenan. Program-program itu diantaranya adalah pelatihan pemuda gereja, dalam kegiatan pelatihan ini, pemuda gereja dilatih untuk menjadi kader yang potensial, berkualitas, mampu untuk menunjukkan jati diri sebagai pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga berjemaat. Karena dalam pelatihan kepemimpinan pemuda gereja ini ada 3 tahap, yaitu tahap dasar, menengah, dan sampai pada tahap tiga yaitu analisa social, sehingga pelatihan kepemimpinan pemuda gereja ini mampu melahirkan pemuda yang berkualitas.

B. Perubahan Peran Pendeta dalam Politik

Menurut Pdt Maggy Walintukan selaku ketua Jemaat Solafide Tinoor menjelaskan: ... yang pertama, fungsi legislasi lembaga legislatif sama halnya dengan fungsi pendeta sebagai imam. Sebelum membuat undang-undang maka harus diketahui dulu kebutuhan masyarakat apa ..

Fungsi dan peran seorang imam dalam Kristen adalah sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan ritual dalam gereja, penjaga tradisi-tradisi Kristen supaya tetap murni. Dalam Perjanjian Lama, aturan-aturan yang ada disampaikan langsung oleh Allah melalui nabi-nabi. Pada gereja modern, fungsi imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang membawahi langsung gereja-gereja yang ada. Aturan yang dibuat pun berdasarkan kebutuhan umat dan tidak menyalahi aturanaturan yang sudah ada dalam Alkitab serta berlaku umum pada gereja-gereja yang dibawahinya. Fungsi ini sejalan dengan fungsi legislasi lembaga legislatif yang bertugas untuk menentukan policy dan membuat undang-undang serta mempunyai hak inisiatif, hak mengamandemen rancangan undang-undang eksekutif dan hak budget. Sebelum membuat undang-undang, legislatif haruslah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi masyarakat sehingga undang-undang yang dihasilkan pun tepat sasaran.

Dalam hubungan gereja dan negara, kata “partisipasi” bisa bermakna positif, bisa pula negatif. Positif, karena menunjukkan keikutsertaan, keterlibatan atau peran gereja dalam dinamika perkembangan kehidupan nasional. Negatif, kalau substansi peran gereja hanyalah ikut atau sekadar hadir tanpa bobot yang “memberi nilai tambah” terhadap perkembangan kehidupan nasional. Dengan kata lain, perlu dibedakan antara partisipasi yang kontributif-transformatif dengan partisipasi yang sekedar ikut-ikutan, turut ramai, membebek. Dari sudut pandang misi gereja, partisipasi Kristen semestinya bersifat positif, kontributif dan transformatif. Dengan sifat itulah diperkembangkan pendekatan partisipasi positif-kreatif, kritis-realistik terhadap pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Konperensi Gereja dan Masyarakat tahun 1971 di Klender, Jakarta.

Partisipasi gereja yang transformatif, dapat menjadi ukuran dalam evaluasi teologis sejarah partisipasi Kristen di Indonesia. Artinya, kita tidak sekadar bangga punya tokoh-tokoh beragama Kristen, atau lembaga-lembaga Kristen dalam sejarah politik nasional kita. Perlu dipertanyakan substansi apa yang merupakan kontribusi para tokoh atau lembaga-lembaga itu dalam kiprah perannya. Predikat Kristen tidak otomatis membuktikan adanya partisipasi Kristen.

C. Peran GMIM dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat di Bidang Politik

Berdasarkan pada bagian hasil penelitian diatas, GMIM melalui setiap aras pelayanan yang ada mulai dari tingkat Sinode, Wilayah, sampai dengan Jemaat, telah berupaya memprogramkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pendidikan politik kepada warga GMIM, dimana pendidikan politik ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada warga GMIM bahwa hidup berbangsa dan bernegara setiap warga gereja sekaligus sebagai warga Negara mempunyai peran penting dalam bidang politik, yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban warga dalam bidang politik. Himbauan dan arahan yang disampaikan oleh BPS GMIM secara berkala selalu dilaksanakan untuk diteruskan kepada Jemaat-Jemaat yang ada disetiap pelayanan GMIM, agar dapat menjaga stabilitas, kerukunan, dan kedamaian, dengan pemahaman bahwa setiap perbedaan itu indah, dan perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang untuk dapat memperdamaikan sesama, karena dalam Kristus kita semua adalah saudara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan wawancara dengan para informan di bagian pembahasan, maka penelitian tentang peran GMIM dalam memberikan penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang politik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada setiap warga gereja GMIM juga telah berperan untuk memberikan kedewasaan kehidupan warga gereja dalam kehidupan politik bangsa, untuk menjaga stabilitas dalam warga gereja, demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, walaupun sosialisasi dan pembinaan ini belum sepenuhnya efektif, karena tidak semuanya aras pelayanan jemaat GMIM dapat menerima dengan baik.
2. Kehadiran para pendeta dalam lembaga legislatif, berdasarkan hasil penelitian ini, belum mampu memberikan pendidikan politik kepada warga gereja, malah menimbulkan antipati dikalangan warga gereja karena dirasa belum mampu menjaga kapasitasnya sebagai pelayan Tuhan, kebanyakan para pendeta yang terlibat dalam politik praktis terhanyut dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan misi kehambaan.
3. Mengingat begitu luasnya wilayah pelayanan GMIM, untuk kedepannya diharapkan dapat membuat program yang universal, artinya program pendidikan politik bagi warga GMIM dapat dijadikan sebagai program pokok GMIM, yang harus dilaksanakan oleh seluruh wilayah yang ada sampai dengan tingkat jemaat.
4. Untuk program kedepannya, diharapkan GMIM Solafide Tinoor dapat lebih intens lagi memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap warga GMIM, mengingat masih sering terjadinya perselisihan antar umat Bergama yang dipicu dari perbedaan pilihan, dalam proses politik.
5. Perlunya penegasan kembali akan fungsi pelayanan seorang pendeta, apabila ada yang terlibat dalam politik praktis, tingkatan Sinode GMIM mampu melakukan Kontrol, agar kapasitas dan fungsi pelayanan pendeta yang terlibat dalam keanggotaan legislative mencerminkan sikap dan perilaku yang benar-benar murni pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, 2005 Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Bottomore, T.B., 2006 Elit dan Masyarakat, Akbar Tandjung Institut, Jakarta
Djiwandono, J Soedjati, 1994, Gereja dan Politik, Kanisius: Yogyakarta
Harjana, A.M., 1993 Penghayatan Agama : Yang Otentik dan Tidak Otentik, Kanisius
Imawan Riswandha, 2000, Metode Penelitian Sosial Fisipol UGM
Johan, Daniel, Disampaikan pada Seminar Pelatihan Organisasi Wajib PATRIA I, DPD PATRIA Jawa Timur, 15-17 Agustus 1998.
Koentjaraningrat, 1997, Kumpulan Tulisan tentang Metode Penelitian Sosial,
Maliki, Zainuddin, 2004, Politikus busuk, Galang Press, Yogyakarta
Marbun, B.N., SH, 2007, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Moleong, J, 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya Bandung
Purwoko, Bambang, 2008, Metode Penelitian Ilmu Politik, bahan kuliah angkatan XVI, Program studi ilmu politik, plod – PPS UGM Yogyakarta.
Robertston, Roland, 1998, Agama dalam analisa dan interpretasi sosiologis, diterjemahkan oleh Fedyani Saifuddin, Rajawali, Jakarta.

Singarimbun, M & S.Efendi, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

Sumartana,TH, 1997, Beberapa masalah sosial politik di kalangan Jemaat Kristen Protestan, PT. Tiara Wacana Yogya.

Van Klinken, Gerry, Minority, Modernity and The Emerging Nation, Christians in Indonesia a Biographical Approach, KITLV Press, Leiden,Netherlands, 2003.

Yewangoe, A.A, 2002, Agama dan kerukunan, Gunung Mulia, Jakarta

Wenas, Jessy, 2007, Sejarah & Kebudayaan Minahasa, Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, Jakarta

Zuliansyah P. Zulkarnain, 2009, Peningkatan Kapasitas (Capacity Building).